

**PERWUJUDAN SISTEM POLITIK INTRAKOMUNITAS DAN
SINERGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS BANK SAMPAH GARDU ACTION, MANCINGAN XI,
PARANGTRITIS, BANTUL**

*Embodiment of the Community's Internal Political System and
the Synergy of Environmental Management:
Case Study of Waste Bank in Mancingan XI, Parangtritis, Bantul.*

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
Alamat e-mail: anggalih.bayu@yahoo.co.id

Naskah Diterima: 19 Januari 2017

Naskah Direvisi: 27 April 2017

Naskah Disetujui: 29 Mei 2017

Abstract

The growth of tourism in the Parangtritis region has affected the life of the community. The increase in the rate of tourism has triggered the waste problem that causes social tensions between communities. The Internal political system of the community try to resolve the problem by presenting the waste bank. This research was conducted using qualitative to see the role of the waste bank as part of the internal political system of the community manages the social community in Mancingan XI. Data collection was done by field observations and in-depth interviews. Interviews were conducted with snowball sampling technique. The results showed a garbage bank as part of the internal political system of the community in Mancingan XI had them play an important role in conflict management, the implementation of community empowerment and democratization at the local level.

Keywords: Mancingan XI, waste, Intra-community Political System, waste bank.

Abstrak

Pertumbuhan pariwisata di Parangtritis telah berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Kenaikan tingkat pariwisata telah menyebabkan adanya masalah sampah dan tekanan sosial pada komunitas. Sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif untuk melihat proses Bank Sampah sebagai elemen dari sistem politik intrakomunitas mengatur komunitas sosial di Mancingan XI. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Kata kunci: Mancingan XI, sampah, sistem politik intrakomunitas, bank sampah.

Latar Belakang

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian fungsi

lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Urgensi pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka pembangunan dalam hal ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya

pengembangan pariwisata, juga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini perlu mengingat terjadi kecenderungan dalam pengembangan kepariwisataan dimana kita bisa membangun dan mengembangkan objek wisata, tetapi kurang memperhatikan bagaimana kelestarian objek wisata tersebut dalam jangka panjang termasuk di dalamnya dalam pengelolaan lingkungan sekitar objek wisata bahkan terhadap objek wisata itu sendiri.¹

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang berkembang cukup pesat saat ini. Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini memberikan peluang terbukanya lahan investasi bagi para investor untuk mengembangkan kawasan wisata. Banyak investor yang menanamkan modalnya dan membuka usaha membantu terciptanya lapangan kerja. Semakin luasnya lapangan kerja di sektor pariwisata ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun di sisi lain keberhasilan ini juga perlu diwaspadai karena telah mengakibatkan degradasi lingkungan di sekitar lokasi Daerah Tujuan Wisata (DTW).² Masalah yang umum muncul adalah peningkatan timbunan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang utama yang perlu mendapatkan jawaban tuntas adalah bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti berorientasi pada upaya pelestarian objek wisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar.³

¹ A. Reni Widyastuti, "Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan", *Jurnal Ekosains*, Vol. II No. 3 (Oktober 2010): 69-70.

² Ninik Budilestari, Malikusworo Hutomo, dan Roby Ardiwidjaja, "Permasalahan Lingkungan Di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2014): 92.

³ Ahmad Nawawi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis," *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 5, Nomor 2 (Agustus 2013): 103-105.

Masalah timbunan sampah meningkat dengan seiring peningkatan laju demografis dan munculnya pusat perekonomian baru yang didorong sektor pariwisata. Kebutuhan akan ruang yang terus meningkat menyebabkan keterbatasan penyediaan bagi tempat memproses timbunan sampah. Timbunan sampah yang muncul dari kegiatan pariwisata lebih jauh bisa mengancam integrasi komunitas sosial, karena munculnya berbagai problem lingkungan.⁴ Kasus timbunan sampah yang muncul dari kegiatan pariwisata di Pantai Parangtritis, Dusun Mancingan XI yang tertumpuk di wilayah Parangkusumo hampir memicu ketegangan sosial antar warga anggota komunitas sosial Mancingan XI. Problem sampah yang muncul dari kegiatan pariwisata tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan oleh sistem politik intrakomunitas yang mampu menyelesaikan masalah melalui mekanisme rembug dan membentuk bank sampah. Hadirnya peranan sistem politik intrakomunitas dalam menyelesaikan masalah sampah di Parangkusumo, Mancingan XI ini juga tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural masyarakat yang telah lama membentuk modal sosial yang erat.

Parangtritis termasuk di dalamnya wilayah Mancingan XI bukanlah sekadar tanah kosong belaka, melainkan suatu teritori yang sarat nilai. Suatu teritori yang menyandang nilai-nilai sangat ragam (plural), mulai dari nilai geologis, nilai-nilai spritual transenden kultural, nilai sosiologis, nilai historis, sampai pada nilai ekonomi kerakyatan. Pluralisme nilai Parangtritis merupakan nilai-nilai fenomenologik eksistensialistik sekaligus transendental. Parangtritis merupakan suatu mosaik eksistensi-eksistensi yang memiliki otoritas sendiri-sendiri yang bermuara pada satu nilai transendental. Parangtritis merupakan *spatial capital* sekaligus *social capital*.⁵

⁴ Mahfud Hasan, Prehatin Trirahayu Ningrum, Khoiron, "Perilaku Wisatawan Terhadap Penanganan Sampah dan Total Coliform Pada Air Danau Ranu Kumbolo TNBTS Kabupaten Lumajang," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2015): 1-3.

⁵ Sudaryono, "Pilar-Pilar Tata Ruang Lokal :Studi Kasus Parangtritis," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 18 No 2 (Agustus 2007): 35.

Keterikatan sistem sosial dan politik komunitas di kawasan Parangtritis juga tidak terlepas dengan keterikatannya pada lingkungan fisik. Secara eksistensial, permukiman Parangtritis “mengada” karena adanya anyaman dari tiga kekuatan dasar, yaitu: kelompok manusia sebagai penghuni dan pembentuk nilai; bentang alam yang berwujud hamparan pasir, laut dan perbukitan; serta infrastruktur atau prasarana ruang yang diciptakan manusia karena memiliki kepentingan di sana. Tiga kekuatan dasar tersebut telah saling menganyam dalam rangkaian waktu yang cukup panjang, sehingga dalam waktu kekinian anyaman tersebut telah menjelma menjadi pilar-pilar penegak eksistensi tata ruang Parangtritis.⁶

Keterikatan dan pengaruh lingkungan fisik pada daya adaptif sistem politik intrakomunitas telah mempengaruhi munculnya harmonisasi manusia dan alam di kawasan Parangtritis, termasuk Mancingan XI. Sistem politik intrakomunitas Mancingan XI yang kini tersermin dalam struktur desa telah sejak lama menjaga harmonisasi kehidupan dengan alam tercermin pula dalam penyelenggaraan tradisi berkah laut yang dianggap sebagai wujud keterikatan manusia dan alam. Begitu pula, ketika sektor pariwisata muncul sebagai pendongkrak sektor perekonomian di Mancingan XI, komunitas sosial tetap berusaha menjaga keseimbangan hidup dengan alam.

Tantangan harmonisasi kehidupan dengan alam semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pariwisata yang memicu permasalahan timbunan sampah. Pada awalnya timbunan sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah Parangkusumo, tepatnya RT 02, Dusun Mancingan XI. Namun, seiring dengan peningkatan kunjungan wisata pantai mulai terjadi *over capacity* di TPS dan hampir saja memicu konflik sosial. Sistem politik intrakomunitas kembali bekerja dalam menyelesaikan problem tersebut sampai berujung pada terbentuknya Bank Sampah *Gardu Action*.

Hadirnya kembali kekuatan komunitas dalam mengatasi masalah sampah dalam keadaan absennya negara merupakan fenomena yang unik. Negara yang seharusnya sesuai dengan mandat publik menyediakan proses pelayanan bagi masyarakat ternyata memiliki berbagai kelemahan dalam realitanya.⁷ Di tengah ketidakhadiran negara, urusan pelayanan dalam hal ini termasuk pengatasan sampah di Mancingan XI menjadi terhambat. Munculnya kembali kekuatan komunitas adalah bukti dari tumbuhnya dorongan masyarakat sipil untuk berdaya secara mandiri di tengah eksistensi negara. Ketidakhadiran negara dalam proses penyelesaian masalah sampah memperlihatkan masih betapa peliknya kuasa formal, apabila dibandingkan dengan kemandirian komunitas yang berusaha terus bertahan. Dorongan dari komunitas yang justru mampu melahirkan bank sampah menunjukkan seberapa kuat pengaruh sistem politik intrakomunitas pada level akar rumput di luar sistem politik formal yang digunakan oleh negara.

Bank Sampah *Gardu Action* menjadi bukti penting masih kuatnya sistem politik intrakomunitas sebagai penanding struktur formal yang diciptakan oleh negara. Bank Sampah *Gardu Action* telah menunjukkan kemandirian komunitas dalam mencukupi kebutuhannya, ketika negara belum mampu mengatasi problem di tingkat akar rumput sesuai dengan kemampuan dan potensi setempat. Bank Sampah *Gardu Action* mampu menjadi penanding sistem politik formal yang digerakkan oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan Bank Sampah *Gardu Action* menjadi tempat musyawarah, interaksi antarwarga, sumber ekonomi, dan wahana demokratisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana cerminan dan proses sistem politik intrakomunitas yang responsif dan sampai mendorong munculnya Bank Sampah *Gardu Action* sebagai wahana bagi sosial di Mancingan XI, Parangtritis, Bantul,

⁶ Sudaryono, “Pilar-Pilar Tata Ruang Lokal,” 36.

⁷ Hesti Puspitosari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik* (Malang : Setara Press, 2011), 17-32.

DIY untuk memberdayakan diri dan mengatasi problem sampah di tengah kurang responsifnya struktur formal yang dijalankan oleh negara.

Tinjauan Pustaka

Menurut Easton setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik. *Pertama*, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. *Kedua*, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. *Ketiga*, sistem mengacu pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah dari segi definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (*the authoritative allocation of social value*). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi *input* bagi sistem yang lain, dan sebaliknya.⁸

Setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain. *Pertama*, ciri identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.

Kedua, *input* dan *output*. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan *input* yang rutin, tetap, dan *ajeg*. Tanpa adanya *input*, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa *output* kita tidak akan

dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. *Ketiga*, diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Gabriel Almond berpendapat bahwa semua sistem mempunyai struktur (institusi atau lembaga), dan unsur-unsur dari struktur ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Fungsi ini bergantung pada sistem dan juga bergantung pada sistem dan juga bergantung pada fungsi-fungsi lainnya. Konsep ini sering disebut pandangan *structural-fungsional*. Sistem politik menyelenggarakan dua fungsi yaitu masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Keduanya terpengaruh oleh sifat dan kecenderungan para aktor politik. Menurut Almond ada lebih dari empat fungsi *input* dan tiga fungsi *output*. *Input* ialah sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan, himpunan kepentingan (*interest aggregation*), serta komunikasi politik. Kemudian dalam perkembangannya Almond mengubah istilahnya menjadi tiga fungsi yaitu fungsi kapasitas, fungsi konversi dan pemeliharaan, dan fungsi adaptasi. Sementara

⁸ David Easton, *Approaches to The Study of Politics* (New York: Macmillan Publishing Company, 1992), 181-185.

itu, komunikasi dianggap sebagai cara menyelenggarakan fungsi-fungsi itu. Sedangkan ada tiga fungsi *output*, yaitu membuat peraturan (*rule-making*), mengaplikasikan peraturan, dan memutuskan (secara hukum) peraturan.⁹

Setiap sistem politik menurut Almond harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Almond telah membahas secara panjang lebar berbagai kategori fungsional yang harus dilakukan suatu sistem politik. Karena hal itu adalah proses-proses yang bertanggung jawab untuk memelihara stabilitas sistem, Almond tidak memberikan penekanan yang sama pada pentingnya sistem yang mungkin telah lebih erat dalam mengikatnya pada kesetiaan Parsonian. Semua yang dikatakannya tentang sistem seperti:

- (a) Mempunyai suatu struktur
- (b) Fungsi yang sama yang dilaksanakan dalam semua sistem politik
- (c) Semua struktur yang menjalankan lebih dari satu fungsi
- (d) Semua sistem terbaru dalam arti bahwa sistem-sistem itu menggabungkan elemen-elemen “primitif dan “modern”.

Tetapi kategori fungsionalnya seperti halnya sifat-sifat sistemik merupakan generalisasi empiris yang didasarkan atas pengetahuan dan pemahamannya tentang sistem politik Barat yang ditawarkan tanpa mendukung bukti. Almond tidak lengah pada kenyataan bahwa dalam pencarian struktur yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu seseorang akan secara kebetulan sampai pada situasi khususnya di wilayah yang sedang berkembang di mana seseorang akan menemukan bahwa proses-proses politik tertentu ternyata “disfungsional” (meminjam istilah Merton) dan membawa pada keadaan tidak seimbang. Tetapi dia akan tetap memutuskan akibatnya berdasarkan kemampuan kategori-kategori fungsional yang ditarik dari pengalamannya tentang sistem-sistem Barat.¹⁰

Fungsi sistem politik tidak terlepas dari fungsi *input* dan fungsi *output* dari sistem politik itu sendiri. Fungsi *input*: sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektifitas yang memungkinkan suatu sistem berjalan. Pada umumnya *input* dalam suatu sistem politik dimanifestasikan kedalam sebuah dukungan (*Support*) dan tuntutan (*demand*) *input* merupakan bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri. Fungsi *output*: pembuatan peraturan dan kebijakan merupakan salah satu fungsi *output* dalam sistem politik. Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainya adapun badan yang membuat peraturan sebagai wujud kebijakan adalah badan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sebuah fungsi.¹¹

Menurut Gabriel A Almond keuntungan pendekatan struktur adalah memberikan kesempatan kepada kita mungkin menghindari kebingungan yang mungkin timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik. Sistem politik pada hakekatnya melaksanakan fungsi mempetahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan agama dan sistem ekonom, melindungi kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain dan menyerangnya. Sistem politik itu menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian baik kedalam masyarakat itu sendiri maupun ke dalam masyarakat lain.¹²

Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi: *polity*, politik, dan *policy* (kebijakan). *Polity* diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Dimensi ini melingkupi

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 77-78.

¹⁰ S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 300-301.

¹¹ Antonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia* (Medan: Fisip Press, 2004), 23.

¹² Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007), 83.

beberapa isu klasik yang berkaitan dengan ilmu politik, seperti siapa yang dapat memaksakan kepentingannya? mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam menangani konflik? Dan sebagainya. Dan terakhir adalah *policy* sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua. Easton berpendapat bahwa definisi politik dari ketiga dimensi ini terbukti lebih efektif, terutama untuk memahami realitas politik dalam upaya memberikan pendidikan politik.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian di fokuskan di RT 02, Dusun Mancingan XI, Parangtritis, Bantul, DIY. Pemilihan lokasi penelitian karena di sini terdapat bank sampah yang muncul didorong oleh problem sampah yang ada di kawasan wisata pantai di Parangtritis yang mencerminkan bekerjanya sistem politik intrakomunitas dalam mengelola ruang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Data atau informasi terkini terkait kegiatan dan berbagai masalah lingkungan serta upaya pengelolaan pariwisata di Mancingan XI, Parangtritis diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Pengambilan data dilakukan pada bulan September-Oktober 2016 di Mancingan XI, Parangtritis, Bantul. Wawancara dilakukan dengan teknik *snowball sampling*.

Mula-mula peneliti menemui informan pangkal yaitu individu yang pertama kali ditemui karena dinilai dapat menjadi 'pembuka pintu' dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya peneliti menemui beberapa informan kunci berdasarkan referensi yang telah diberikan oleh informan pangkal. Informan kunci adalah individu individu tertentu yang dinilai menguasai permasalahan yang hendak diteliti dan mempunyai keahlian serta berwawasan cukup terkait pengelolaan wisata dan Bank Sampah *Gardu Action* di

Mancingan XI, Parangtritis, Bantul. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari Penasihat Bank Sampah *Gardu Action*, Kepala Dusun Mancingan XI, Ketua RT 02, Warga yang tinggal dekat dengan Bank Sampah, Ketua dan anggota pengelola Bank Sampah *Gardu Action*.

Struktur Sosial-Politik Mancingan XI

Pengelolaan pariwisata di kawasan Parangtritis yang mengandalkan pada eksotisme pantai dan wisata budaya telah mampu memancing laju pariwisata yang tinggi. Laju pariwisata yang tinggi tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk warga dusun Mancingan XI. Di Mancingan XI terdapat beberapa pantai yang dikelola secara kemitraan antara warga dan pemerintah daerah. Banyak dari warga dusun yang menjadi pengelola *homestay*, losmen, penyewa *dhokar*, penjual makanan, dan lain-lain. Laju pariwisata yang tinggi telah pula meningkatkan kebutuhan akan ruang dan tekanan demografis.

Laju pariwisata telah memicu banyaknya pendatang dari berbagai daerah bahkan di luar Yogyakarta untuk mengadu nasib ke Mancingan XI. Geliat ekonomi telah memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru selain kegiatan pertanian, penyewaan losmen, dan lain-lain. Kehadiran pendatang ke dalam tatanan komunitas Mancingan XI tentu menyebabkan mereka harus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial setempat. Warga pendatang biasanya membangun tempat tinggal dengan cara mengkontrak ataupun menyewa tanah. Tempat tinggal para pendatang ini berada di luar komunitas Mancingan XI dan dapat dibedakan dengan ciri rumah semi permanen.

Para pendatang secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem politik intrakomunitas Mancingan XI yang menyebabkan munculnya perubahan relasi dan proses penyelesaian masalah. Sistem politik intrakomunitas di dalam masyarakat asli Mancingan XI yang dibentuk oleh interaksi manusia dengan alam ternyata belum mampu merespon dengan baik

datangnya tekanan demografis. Akibat dari masih lemahnya responsivitas sistem politik intrakomunitas tersebut menyebabkan seolah komunitas sosial di Mancingan XI terpecah menjadi dua bagian yaitu masyarakat asli dan pendatang.

Masyarakat asli dan pendatang di Mancingan XI menunjukkan pola relasi sosial-politik yang berbeda. Kedua komunitas ini secara formal memang satu wadah di dalam struktur dusun, akan tetapi dalam dinamika komunitas itu sendiri berjalan dengan menunjukkan corak yang berbeda-beda. Masyarakat asli masih memegang sistem politik intrakomunitas yang masih terlekat kuat dengan budaya Jawa. Sistem politik intrakomunitas masyarakat asli Mancingan XI telah terjaga dengan adanya ikatan sosio-magis yang tertanam kuat dalam diri masyarakat. Sistem politik intrakomunitas ini terus bertahan dan mengalami berbagai penyesuaian seiring berjalannya waktu.

Sistem Politik Intrakomunitas dan Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Masyarakat asli Mancingan XI terus berusaha mempertahankan eksistensi di tengah gerusan kapitalistik yang terus muncul dari laju pariwisata yang terus meningkat. Masyarakat asli berusaha menjadikan pariwisata sebagai sumber penghidupan, akan tetapi kegiatan pertanian masih menjadi mata pencaharian utama. Terpeliharanya profesi pertanian ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai budaya Jawa yang membentuk sistem politik intrakomunitas itu sendiri. Masyarakat asli Mancingan XI terus memelihara sistem politik intrakomunitas, hal ini terbukti dengan kuatnya modal sosial yang terwujud dalam terselenggaranya kegiatan “berkah laut” setiap tahun. Masyarakat asli Mancingan XI juga sebenarnya belum terlalu menyadari potensi pengelolaan pariwisata, hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran warga setempat untuk mengelola sampah yang muncul dari kegiatan pariwisata. Seperti pemaparan dari Ketua RT 02, Mancingan XI yang telah menegaskan bahwa penduduk setempat memang belum memiliki wawasan

yang baik dalam mengelola sampah hasil pariwisata, sebagai berikut:

“Warga belum terlalu menyadari potensi pengelolaan pariwisata secara baik, satu contoh yang menjual jajanan olahan kelapa begitu selesai, batok kelapa ditinggal dan menumpuk di sepanjang pantai. Masyarakat belum tahu dan memiliki kesadaran yang rendah terkait pengelolaan sampah. Pemerintah daerah Bantul sebenarnya telah membuat perda tentang sampah, namun kebanyakan warga tetap belum tahu karena minim sosialisasi.”¹³

Masalah semakin bertambah karena ada perbedaan dengan para pendatang. Masyarakat pendatang memiliki relasi yang relatif impersonal dan kebanyakan berprofesi sebagai wirausaha. Masyarakat pendatang pada umumnya datang dari Surakarta dan Magelang serta daerah lain. Mereka menyewa tanah penduduk atau menggunakan izin hak guna bangunan. Masyarakat pendatang juga memiliki relasi dan integrasi sosial yang relatif renggang dengan masyarakat asli Mancingan XI. Masyarakat asli pada umumnya kurang mengenal para pendatang, meskipun telah menetap selama bertahun-tahun. Masyarakat pendatang juga tidak memiliki interaksi internal yang kuat, hal ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang berbeda. Sebagian besar masyarakat pendatang mencari penghidupan dengan membuka usaha warung makan, menyewakan *home stay*, dan ada pula yang membuka usaha tambak. Perbedaan corak kegiatan ekonomi dan impersonalitas masyarakat pendatang ini menyebabkan sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI hanya mampu merespon adanya *input* yang muncul dari dalam komunitas masyarakat asli. Dari 100 KK yang ada di RT 02, Dusun Mancingan XI kurang lebih 65 KK adalah penduduk asli. Mereka masih memiliki ikatan sosio-magis budaya Jawa yang kental dan memiliki mata pencaharian utama sebagai petani.

Kehadiran pendatang dan terus meningkatnya laju pariwisata khususnya di sekitar Pantai Parangtritis menyebabkan

¹³ Wawancara dengan Ketua RT 02, Dusun Mancingan XI pada 8 Oktober 2016.

lonjakan timbunan sampah. Sebagai salah satu tempat wisata yang cukup populer di Jogja, Pantai Parangkusumo memang menyumbangkan sampah dalam jumlah yang cukup besar. Pada hari biasa, sampah yang dihasilkan penduduk dan wisatawan di pantai ini bisa mencapai lebih dari 1200 liter per hari. Sedangkan pada musim liburan bisa mencapai 7000 liter per hari.¹⁴ Di wilayah RT 02, Dusun Mancingan XI terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang menampung sampah dari hasil pariwisata pantai Parangtritis dan buangan warga setempat. Seiring berjalannya waktu timbunan sampah terus meningkat, sehingga TPS tidak lagi mampu menampung. Timbunan sampah berhamburan melebihi kapasitas TPS dan menyebabkan polusi yang mengganggu keberlangsungan lingkungan dan kehidupan warga. TPS yang berlokasi dekat dengan pemukiman masyarakat pendatang juga memicu ancaman disintegrasi di dalam komunitas RT 02, Mancingan XI.

Konflik sosial hampir saja muncul akibat timbunan sampah yang terus menumpuk di TPS. Sistem politik intrakomunitas mencoba merespon *input* yang masuk, namun akibat dari adanya relasi dan integrasi yang renggang antara masyarakat asli dan pendatang di Mancingan XI pada awalnya terjadi kesulitan dalam proses penyelesaian konflik. Ketua RT 02, Mancingan XI awalnya sebagai elite lokal berusaha membangun komunikasi dengan struktur formal dalam hal ini pemerintah daerah, namun ternyata mendapat respon yang tidak baik. Struktur formal yang dijalankan negara tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi oleh komunitas sosial yang ada di Mancingan XI. Hal ini sesuai dengan paparan Ketua RT 02, Mancingan XI:

“Pemerintah daerah mau membuat tempat pembuangan sampah sementara kesusahan. Dulu mengusulkan di RT sini dan RT lain, namun ditolak. Saya pernah mengusulkan

*tempat pembuangan sampah sementara dibuat terpadu di gumpuk pasir dekat kawasan Depok, namun mendapat ketidaksetujuan dari komunitas pemelihara gumpuk pasir. Akibat buntu, ketegangan hampir saja muncul, namun kami berusaha terus berembug.”*¹⁵

Sistem politik intrakomunitas terus mencoba menyesuaikan diri untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang muncul, agar tidak terjadi peningkatan intensitas ketegangan sosial. Elemen dari sistem politik intrakomunitas yaitu karang taruna mencoba mengawasi penyelesaian masalah. Karang taruna mencoba melobi ketua RT 02 sebagai elite lokal terdekat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Ketua RT 02 melanjutkan proses negosiasi dengan Kepala Dusun Mancingan XI, sehingga kemudian antarelemen sistem politik intrakomunitas mencoba menyelesaikan masalah. Karang taruna memelopori proses interaksi dan pembentukan konsensus antara anggota komunitas, Ketua RT 02, Kepala Dusun Mancingan XI untuk kembali menguatkan komitmen yang telah terkandung dalam nilai-nilai yang dianut komunitas untuk menjaga harmonisasi insan dan alam. Proses musyawarah akhirnya mengambil komitmen untuk menata TPS yang ada di RT 02, Dusun Mancingan XI secara lebih baik. Diawali dengan proses gotong royong membersihkan lingkungan sekitar TPS, komitmen untuk menata kembali keselarasan alam dan manusia telah kembali.

Karang taruna sebagai bagian dari sistem politik intrakomunitas hadir sebagai agen pembaharu. Karang taruna muncul untuk menggerakkan dan di lain sisi mendorong sistem politik intrakomunitas untuk lebih adaptif dan responsif. Karang taruna telah memicu munculnya komunikasi sosial antara warga asli dan pendatang, sehingga memperkuat jejaring komunitas. Komunikasi sosial sebagai dimensi yang luas dan dalam dari hubungan antarmanusia, menempatkan kemanusiaan ke dalam saling keterhubungan secara individual dan kolektif. Komunikasi sosial telah membuka

¹⁴ Dian Norras, “Gardu Action Asyiknya Selfie dan Pasang Aksi Memanfaatkan Barang Tak Terpakai,” *YogYes*, 1 September 2016, diakses pada 15 April 2017, <https://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-object/other/Gardu-action/>

¹⁵ Wawancara dengan Ketua RT 02, Mancingan XI pada 8 Oktober 2016.

jalan akan adanya kepentingan bersama dalam internal komunitas.

Komunikasi sosial juga akan meningkatkan ketersediaan *sharing* informasi dan upaya penyelesaian masalah bersama yang akan dilakukan dan diimplementasikan oleh komunitas. Dalam perkembangan suatu komunitas diperlukan suatu proses-proses dan pola-pola komunikasi yang berlandaskan kepada komunikasi sosial. Komunikasi sosial menjadi kunci awal dari penyelesaian masalah yang akan dilakukan sistem politik intrakomunitas. Komunikasi sosial seolah wahana dalam mengagregasikan kepentingan yang akan diproses menjadi *input* bagi sistem politik intrakomunitas. Komunikasi sosial yang terjadi dalam komunitas setidaknya harus memenuhi beberapa aspek yaitu : *the numbers of participants; publicness; fungsi informasi, interpretasi, dan entertainment; cultural group.*¹⁶

Karang taruna, Ketua RT 02, dan Kepala Dusun Mancingan XI bersama anggota komunitas lebih lanjut menyepakati terbentuknya bank sampah di samping terdapat TPS. Bank Sampah dianggap sebagai wujud respon dari sistem politik intrakomunitas dalam menyelesaikan problem sampah yang hampir saja memicu ketegangan sosial. Bank Sampah juga diharapkan ke depannya menjadi sumber mata pencaharian tambahan bagi anggota komunitas Mancingan XI. Bank Sampah ini juga muncul dari inisiatif karang taruna yang hadir sebagai agen pembaharu bagi sistem politik intrakomunitas. Bank Sampah yang dibentuk di dusun Mancingan XI ini diberi nama Bank Sampah *Gardu Action*. Bank Sampah menjadi elemen baru dari sistem politik intrakomunitas yang telah melakukan beberapa peran fungsi seperti manajemen konflik, pemberdayaan, dan peningkatan proses demokratisasi di dalam komunitas.

Komunikasi sosial yang didorong oleh Karang Taruna Mancingan XI merupakan bentuk difusi inovasi yang berhasil mengeluarkan

output berupa bank sampah. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses difusi inovasi menempatkan masyarakat dalam posisi yang kuat dan berdaya karena mampu menjadi *author* bagi diri dan lingkungannya. Dalam kondisi tersebut terciptalah sebuah proses pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat melalui lahirnya Bank Sampah *Gardu Action* telah membuka ruang luas bagi kebaruan melalui inovasi-inovasi yang disebarkan pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dari dalam ini telah membuat komunitas berdaya.

Kemandirian telah terbentuk dalam komunitas Mancingan XI dalam mengatasi masalah sampah. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.¹⁸

Masyarakat memiliki potensi dan kekuatan dari sumber-sumber daya alam dan sosial budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu digali melalui strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelesaian masalah yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas Mancingan XI telah menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan yang partisipatif. Jiwa partisipatif

¹⁶ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 175-191.

¹⁷ Shinta Prasyanti, "Difusi Inovasi dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Acta Diurna*, Vol 9, No.1 (2013): 58-62.

¹⁸ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1 (Juni 2011): 13.

yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya.

Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan dan keberhasilan penyelesaian masalah. Keterlibatan masyarakat sipil bisa dilakukan jika masyarakat mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki baik itu modal fisik, modal manusia maupun modal sosial demi suksesnya pembangunan kesehatan masyarakat. Peningkatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan terjadi karena menguatnya kekuatan atau modal yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan sendiri berbagai persoalan yang mereka alami.¹⁹

Langkah yang ditempuh oleh komunitas Mancangan XI juga merupakan proses pemberdayaan secara mandiri. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil penyelesaian masalah. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin

dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu: (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.²⁰

Proses yang dialami oleh komunitas Mancangan XI menunjukkan sebuah kelompok sosial yang sudah bertransformasi sesuai dengan berbagai kriteria sebagai berikut:²¹

1. Internalisasi nilai-nilai dan prinsip prinsip universal, sebagai pondasi kokoh memberdayakan masyarakat menuju tatanan yang mampu mewujudkan kemandirian dan pembangunan keberlanjutan.
2. Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (*community based development*), masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, dan lain-lain, yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya kapital sosial.
3. Pembelajaran penerapan konsep tridaya dalam penanggulangan kemiskinan, menekankan pada proses pemberdayaan sejati (bertumpu pada manusia-

¹⁹ Kurniawan Arianto dan Eliza Nur Fitriana, "Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 17, No 2 (November 2013): 6.

²⁰ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan," diunduh pada 27 April 2017, <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>

²¹ Rahayu Kristiniati dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 2 (September 2014):210.

manusianya) dalam rangka membangkitkan ketiga daya yang dimiliki manusia, agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, tercipta masyarakat ekonomi produktif dan masyarakat pembangunan yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman sehat, produktif dan lestari.

4. Penguatan akuntabilitas masyarakat, menekankan pada proses membangun dan menumbuhkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli melakukan kontrol sosial obyektif dan efektif, sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan mendorong kemandirian serta keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing

Bank Sampah *Gardu Action* sebagai Cerminan Sistem Politik Intrakomunitas

Budi Bamboo, Pembina *Gardu Action* mengatakan, kegiatan bank sampah kelolaan para pemuda, di Parangkusumo telah berdiri sejak 4 Juli 2015. Diawali dengan sepakat bergerak membersihkan tumpukan sampah di pinggir Parangkusumo, pantai tetangga Parangtritis, sampai terkumpul 30 kantong besar. Sampah hasil gotong royong yang menumpuk menimbulkan kebingungan, sampai akhirnya muncul gagasan pembuatan bank sampah. Karang taruna kemudian belajar ke Bambang Suwerda, penggagas bank sampah di Indonesia untuk mengetahui seluk-beluk pengelolaan bank sampah. Setelah mantap menentukan konsep bank sampah, para pemuda *Gardu Action* pun merasa langkah mereka harus didukung perangkat desa. Mereka pun meminta waktu agar bisa bertemu dan menyampaikan langkah mereka dengan para kepala dusun. Setelah mendapat persetujuan, *Gardu Action* merumuskan sebuah acara yang sekaligus menjadi deklarasi pendirian komunitas bank sampah itu. Pada 14–19 Agustus 2015, *Gardu Action* mengadakan *recreational* dan *education camp*. Dengan mengandalkan internet dan komunikasi seluler, sekitar lima sekolah, ditambah beberapa teman

dari Banten, Kalimantan, dan Sumatera, mengikuti acara sosial itu dan menjadi titik awal pergerakan komunitas untuk melestarikan lingkungan. Rutinitas para pemuda Mancingan pun praktis bertambah sejak saat itu. Dimulai dengan mendata para warga yang ingin menjadi nasabah bank sampah sampai mendistribusikan sampah itu ke bank sampah induk di Sleman.²²

Bank Sampah *Gardu Action* sebagai jawaban yang ditawarkan oleh sistem politik intrakomunitas telah menjadi solusi dari ancaman konflik dari keadaan *over capacity* TPS yang memicu gangguan timbunan sampah. Bank Sampah *Gardu Action* telah memberikan mekanisme baru berupa proses daur ulang sampah bahkan menjadikan sampah menjadi memiliki nilai ekonomis, sehingga kehadirannya tidak hanya meredam konflik, namun juga menjadikannya sebagai kepedulian bersama bagi komunitas.

Kehadiran Bank Sampah *Gardu Action* memperlihatkan bagaimana proses pengeolaan konflik yang dilakukan dan diredam oleh sistem politik intrakomunitas. Tujuan pengelolaan konflik adalah terwujudnya kesatuan pandangan dan terciptanya kerja sama dalam suatu komunitas, agar semua pihak memiliki jalan untuk memahami metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemecahan masalah. Pada praktiknya sebagian besar porsi perhatian lebih dititikberatkan kepada peningkatan *capacity building*, pengembangan konsep-konsep analisis konflik, dan tersusunnya desain proses bagi pengelolaan konflik yang memadai.²³

Bank Sampah *Gardu Action* telah membantu memberikan sumber penghidupan baru bagi komunitas. Bank Sampah *Gardu Action* telah mengolah sampah menjadi barang ekonomis yang menjadi sumber pendapatan baru bagi anggota komunitas. Pelibatan anggota komunitas sebagai nasabah di Bank Sampah

²² Tri Mujoko Bayuaji, "Vika Wahyu Aji, Penggagas Bank Sampah di Pinggiran Parangtritis," *Jawa Pos*, 6 Agustus 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://www.jawapos.com/read/2016/08/04/43011/vika-wahyu-aji-penggagas-bank-sampah-di-pinggiran-parangtritis>.

²³ Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, 191-205

Gardu Action telah mendorong perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi nasabah akan merasakan manfaat akumulatif melalui menabung sampah setelah satu bulan setidaknya, sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi anggota komunitas. Bank Sampah *Gardu Action* sendiri sejak berdiri pada 4 Juli 2015 menggunakan permodalan sendiri dari komunitas yaitu sebesar Rp675.000,00., khususnya elemen karang taruna yang bertindak sebagai pengelola. Sampai dengan Oktober 2016 Bank Sampah *Gardu Action* juga telah mengalami pengembalian modal. Bank Sampah *Gardu Action* juga semakin meningkatkan kapasitas sebagai tempat wisata alternatif. Dengan mengolah sampah menjadi berbagai hiasan yang ditempatkan di beberapa titik gumuk pasir Parangkusumo dan menjadikan lokasi Bank Sampah sebagai tempat berkemah semakin menambah nilai tambah dari Bank Sampah *Gardu Action*. Bank Sampah *Gardu Action* sendiri mendapat pemasukan dari beberapa sumber yaitu retribusi parkir, tiket masuk, donasi, usaha kedai dan penyewaan tempat berkemah. Fasilitas yang ada di *Gardu Action* terbilang cukup untuk ukuran tempat bersantai. Ada bangku-bangku yang dibuat dari kayu bekas, *Gardu* pandang di atas pohon, warung kopi yang menyediakan makanan dan minuman, toilet yang disusun menarik, *camping ground*, penyewaan ATV, sebuah *gazebo* unik didekat pantai yang biasa digunakan untuk melihat *sunset*, dan tempat berfoto.²⁴

Pengelola *Gardu Action* mengakui bahwa banyak orang mendatangi tempat ini untuk sekadar berfoto-foto. Akan tetapi, tujuan para pengelola *spot* wisata ini tidak sesederhana itu. Mereka mempunyai visi dan misi untuk memberikan edukasi kepada wisatawan, terutama anak muda, tentang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah agar tidak menjadi limbah yang merusak lingkungan. Area terbuka di *Gardu Action* bisa digunakan untuk

berkemah. Anggota *Gardu Action* biasanya memberikan edukasi tentang sampah kepada para peserta kemah. Mereka juga mengadakan kegiatan daur ulang sampah, termasuk cara-cara mengubah sampah menjadi sesuatu yang layak dijual.

Bank Sampah *Gardu Action* sebagai bagian baru dari sistem politik intrakomunitas Mancingan XI telah menjadi agen pemberdayaan komunitas. Bank Sampah *Gardu Action* dalam proses operasionalnya dikelola oleh para sukarelawan yang kebanyakan berasal dari elemen karang taruna. Bank Sampah *Gardu Action* telah memberikan ruang kehidupan baru dengan bagi hasil pendapatan 70 % untuk kas dan 30 % untuk bagi hasil pegawai. Beberapa sukarelawan Bank Sampah bahkan rela meninggalkan pekerjaan lamanya untuk lebih fokus ikut serta dalam mengelola lingkungan dan menjadikannya sebagai sumber pemasukan baru. Bagi para pengunjung yang datang ke *Gardu Action* biasanya membayar parkir sekitar Rp2000,00 dan untuk menikmati kreasi-kreasi uniknya kita harus membayar sekitar Rp3000,00/orang. Biaya tersebut dijadikan untuk perenovasian serta pemeliharaan benda-benda di *Gardu Action*.²⁵ Ketua Bank Sampah *Gardu Action* sendiri membuat pengakuan terkait dengan pilihannya untuk lepas dari pekerjaannya dan fokus untuk mengabdikan, sebagai berikut:

*"Saya sendiri dulu anggota SAR, namun kini fokus untuk bekerja di Bank Sampah ini. Bedanya kalau dulu bekerja di bidang kemanusiaan, kini bekerja di bidang lingkungan. Teman-teman lain juga banyak yang dulu bekerja sebagai juru parkir, pengendara bendi, namun sekarang memilih fokus di sini padahal pekerjaannya yang dulu memiliki pendapatan yang pasti. Bahkan ada yang sampai cuti kuliah satu tahun dan terlambat skripsi karena lebih mengutamakan mengabdikan di bank sampah ini."*²⁶

Bank Sampah *Gardu Action* sebagai bagian dari sistem politik intrakomunitas menjadi wahana

²⁴ Meisa Iryanti, "Gardu Action Wahana Edukasi Sampah yang Unik," *Tribun News*, 13 Januari 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/01/13/Gardu-action-wahana-edukasi-sampah-yang-unik>.

²⁵ "Apa Itu Gardu Action?," SMP N 2 Bambang Lipuro, 17 Januari 2017, diakses pada 15 April 2017, <http://smpn2bambanglipuro.sch.id/2017/01/17/apa-gardu-action/>.

²⁶ Wawancara dengan Ketua Pengelola Bank Sampah *Gardu Action*, Vika Wahyu Aji pada 15 Oktober 2016.

pemberdayaan yang dapat merubah mentalitas aktor-aktor politik dan relasi di dalam komunitas. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu meningkatkan kemandirian. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.²⁷

Pengurus *Gardu Action* ini tak hanya ingin menciptakan sebuah tempat wisata unik Yogyakarta, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Sebelum dikreasikan, sampah-sampah yang dikumpulkan oleh pengelola *Gardu Action* dari sepanjang pantai dipilah menjadi dua bagian, yakni sampah organik dan anorganik. Jika sampah organik bisa dijadikan kompos, maka penanganan sampah yang sulit terurai beda lagi. Menerapkan 3 prinsip penanganan sampah anorganik, barang bekas bisa dimanfaatkan kembali (*reuse*) lalu di olah menjadi barang-barang unik layak pakai (*recycle*) serta terus mengkampanyekan kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi penggunaan barang yang sulit terurai (*reduce*). Sebelum digunakan sampah-sampah yang dikumpulkan dari area sekitar pantai juga dari rumah-rumah penduduk melalui bank sampah dipilah menjadi dua bagian. Sampah yang cepat membusuk seperti sisa sayuran dengan sampah yang sulit terurai seperti kertas dan plastik. Setelah dipisahkan, sampah-sampah yang mudah membusuk pun dapat diolah menjadi kompos.

Kebanyakan sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat di daur ulang menjadi barang baru lagi, seperti botol, kaleng bekas,

plastik bekas, kayu-kayu dan sebagainya. Sampah-sampah tersebut disulap menjadi barang-barang seperti lampu hias yang unik, tas dari sampah plastik, patung dari botol bekas, dan lainnya. Sesuai dengan namanya, *Gardu Action* atau *Garbage Care and Education*, pengelola *Gardu Action* ini akan dengan senang hati memberikan penjelasan tentang seluk beluk sampah kepada siapa pun yang berkunjung. Sejak memasuki kawasan ini, upaya edukasi sudah dilakukan dengan menampilkan bank sampah dan tempat pemilahan sampah. Dari titik ini maka pengunjung akan tahu bagaimana cara memilah sampah supaya bisa didaur ulang. Selain itu pengunjung juga bisa berdiskusi dengan pengelola tentang cara membuat aneka sampah tak berguna menjadi barang yang menarik bahkan memiliki nilai seni dan nilai guna yang baru. Jadi, selain berwisata juga akan mendapatkan pengetahuan baru.²⁸

Bank Sampah *Gardu Action* sebagai jawaban yang diberikan oleh sistem politik intrakomunitas atas permasalahan sampah telah menjadi ruang interaksi baru dan wahana peningkatan demokratisasi di aras lokal. Bank Sampah *Gardu Action* telah mengembalikan kembali dan memperkuat nilai-nilai harmonisasi insan dan alam yang selama ini terlekat dalam diri komunitas Mancingan XI. Bank Sampah *Gardu Action* memacu anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan terlibat menjadi nasabah dan aktif memberikan adanya informasi tumpukan sampah baik rumah tangga maupun wisata. *Gardu Action* ini merupakan bank sampah untuk masyarakat, di sini juga ada tempat pemilihan untuk sampah, sistem yang dibangun di bank sampah ini adalah sistem menabung. Warga yang menyerahkan sampah akan diberi nota dan akan dibayar setiap 1 bulan sekali.²⁹

²⁸ Hendra Nurdiyansyah, "Gardu Action, Mengurai Sampah Menjadi Wisata Edukasi," *Maioloo*, 3 Mei 2016, diakses pada 15 April 2017, <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/yogyakarta-jogja/Gardu-action/>.

²⁹ Koran Yogya, "Bank Sampah *Gardu Action* 'Garbage Care And Education,'" *Koran Yogya*, 8 November 2015, diakses pada 15 April 2017, <https://koranyogya.com/bank-sampah-Gardu-action-garbage-care-and-education/>.

²⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung : Alfabeta,2014), 41-61.

Bank Sampah *Gardu Action* telah membantu mempererat jejaring komunitas dalam mengelola lingkungan secara lebih baik. Komunikasi yang erat mengenai informasi ataupun penduduk yang antusias menjadi nasabah sampah memperlihatkan sinergi yang kuat dalam pengelolaan lingkungan. Bank Sampah *Gardu Action* sendiri melayani sampah secara formalitas tiap hari Selasa dan Jumat dalam seminggu, namun setiap hari ternyata ada anggota komunitas yang datang untuk menabung sampah, sehingga membuat pegawai harus siap melayani setiap sore hari. Hal ini telah mengindikasikan bagaimana sistem politik intrakomunitas mampu mengelola diri dan memanfaatkan budaya *guyub* yang ada dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Sebuah proses upaya peningkatan partisipasi tentunya akan lebih efektif, apabila mendayagunakan setting sosial-budaya maupun sosial-politik yang sudah ada. Peluang bagi anggota komunitas untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan secara demokratis, selain ditentukan oleh struktur kekuasaan dan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan juga ditentukan oleh sifat masyarakat dan kondisi wilayah di mana mereka berada.³⁰

Partisipasi anggota komunitas yang muncul di Bank Sampah *Gardu Action* memperlihatkan bagaimana sistem politik intrakomunitas meningkatkan proses demokratisasi di tingkat lokal. Proses demokratisasi yang didorong oleh peran Bank Sampah *Gardu Action* setidaknya terdapat beberapa karakteristik yaitu penguatan volunterisme; proses pembentukan konsensus; dan relasi komunitas dengan negara.

Volunterisme yang muncul dalam kegiatan Bank Sampah *Gardu Action* sendiri muncul sejak awal upaya penyelesaian konflik akibat timbunan sampah. Bank Sampah yang muncul karena kemitraan antara aparat RT 02, pamong dusun Mancingan XI, karang taruna dan adanya program KKN mahasiswa Universitas Ahmad

Dahlan yang turut membantu perwujudan Bank Sampah *Gardu Action* adalah wujud kesukarelaan dalam pengelolaan lingkungan. KKN-PPM UAD 2015 yang didanai Dikti ini fokus pada program pemberdayaan warga masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program KKN-PPM UAD yang dilaksanakan di Mancingan XI ini bagian dari program yang dilaksanakan 27 mahasiswa di 3 desa yaitu dusun Grogol IX, Grogol X, dan Mancingan. Banyak program yang sudah dijalankan oleh KKN-PPM, antara lain penyuluhan kepada warga terkait bahaya dan manajemen pengelolaan sampah dengan didampingi oleh tim bank sampah. Selain itu, pelatihan pembuatan kompos kepada warga, pembuatan *souvenir* atau kerajinan kepada ibu PKK dari sampah plastik, pelatihan pemilahan sampah, edukasi budaya hidup sehat kepada anak PAUD dan SD di sekitar, kerja bakti pantai, serta *bazzar recycle* sampah.³¹

Kehadiran dan keterlibatan komunitas seniman pada awal operasional Bank Sampah juga ikut membantu perwujudan sebagai tempat wisata alternatif. Sebagian besar pegawai Bank Sampah adalah orang yang menyisakan waktunya untuk operasional Bank Sampah. Perwujudan usaha kedai untuk menambah nilai tambah juga muncul dari upaya kesukarelaan. Seluruh perabot dan alat yang digunakan di kedai sebagian besar adalah milik sukarelawan yang terlibat aktif dalam operasional Bank Sampah *Gardu Action*.

Komunitas awalnya mencoba mengawali kampanye bank sampah ke masyarakat. Apabila bank sampah sebelumnya hanya mengumpulkan sampah dari masyarakat, maka bank sampah yang digagas oleh karang taruna Mancingan XI yang disebut *Gardu Action* ini sedikit berbeda. Pengelola melakukan penjemputan sampah ke masing-masing rumah masyarakat. Berbekal sepeda motor, pengelola melakukan jemput bola sampah warga. Sampah tersebut tidak serta merta diambil, melainkan ada mekanisme

³⁰ Kutut Suwondo, *Civil Society di Aras Lokal Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa* (Salatiga : Pustaka Percik, 2005), 65-87.

³¹ "Mahasiswa dan Dosen UAD Peduli Sampah," *Universitas Ahmad Dahlan*, 22 Agustus 2015, diakses pada 15 April 2017, <http://uad.ac.id/id/berita/mahasiswa-dan-dosen-uad-peduli-sampah>.

jual beli. Pengelola membeli sampah dari masyarakat dan menjualnya kembali ke bank sampah induk. Namun yang unik, masyarakat tidak mendapatkan uang tunai hasil penjualan sampah. Masyarakat mendapatkan uang hasil penjualan sampah berupa tabungan. Tabungan ini nantinya dapat diambil warga yang menjadi nasabah untuk memenuhi kepentingan mendesak. Melalui konsep bank sampah ini, pengelola beserta komunitasnya tidak hanya membantu masyarakat dalam menyalurkan sampah, melainkan juga ikut mereduksi tumpukan sampah di Pantai Parangtritis. Dengan kata lain, komunitas juga ikut melestarikan lingkungan.³²

Peran Bank Sampah *Gardu Action* sebagai wahana demokratisasi juga tercermin dalam proses pembentukan konsensus dalam masyarakat. Hadirnya Bank Sampah menjadi ruang interaksi baru bagi anggota komunitas untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran anggota komunitas dan elite desa setiap tanggal 4 tiap bulannya dalam kegiatan *rembug* memperlihatkan kemajuan dan kinerja sistem politik intrakomunitas yang semakin demokratis. Kehadiran Bank Sampah dengan tetap memanfaatkan semangat *guyub* adalah berusaha mengolah ulang budaya setempat agar dapat memfasilitasi partisipasi anggota komunitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya perkembangan sosial-politik di aras lokal yang bersesuaian dengan kemajuan zaman. Perkembangan sosial-politik di suatu desa tidak hanya akan mempengaruhi perkembangan setiap rakyat yang bersangkutan di dalam proses pembangunan, namun juga akan mempengaruhi struktur dan mekanisme organisasi pada aras lokal terutama organisasi pemerintahan desa. Selain itu, perkembangan sosial-politik di aras lokal secara langsung akan mempengaruhi perkembangan antara hubungan antara rakyat dan negara.³³

³² Samsara Ladiatno, "Berawal dari Keprihatinan Banyaknya Sampah Tercipta Ide Bank Sampah," *Inovasi Administrasi Negara*, 1 September 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=857>.

³³ Suwondo, *Civil Society di Aras Lokal Perkembangan*, 87-108.

Terkait dengan relasi antara negara dan komunitas dalam kasus Bank Sampah *Gardu Action* telah memperlihatkan fenomena interaksi sistem politik intrakomunitas dengan sistem politik formal yang dijalankan oleh negara. Sistem politik intrakomunitas Mancingan XI yang tercermin dalam Bank Sampah *Gardu Action* ketika berelasi dengan sistem politik formal tidak terlepas dari *setting* sosial-budaya dan *setting* sosial-politik yang mengitarinya. Dinamika relasi sistem politik intrakomunitas dan sistem politik formal menjelaskan mengenai bekerjanya suatu sistem politik untuk menanggapi lingkungannya yang selalu berubah.³⁴

Bank Sampah *Gardu Action* pada awalnya berdiri secara swadaya, namun seiring dengan berjalannya waktu semakin dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan bank sampah membutuhkan peningkatan armada. Bank Sampah sendiri selama ini melayani dengan kendaraan berupa motor untuk mengangkut sampah dari tiap titik maupun permintaan warga yang menghubungi melalui telepon. Namun, dengan semakin meningkatnya permintaan menyebabkan adanya kebutuhan berupa transportasi dan gerobak angkut yang lebih layak. Kendala yang muncul ialah komunitas tidak mampu menyediakannya secara swadaya. Selain itu, adanya momentum dari program pemerintah daerah untuk melestarikan gumpuk pasir dan lingkungannya berusaha dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat bagi komunitas untuk berelasi dengan negara. Sistem politik intrakomunitas kemudian berusaha menjawab tantangan yang muncul tersebut dengan menyesuaikan diri. Lingkungan setempat dan adanya struktur formal serta adanya desakan kebutuhan telah mendorong interaksi sistem politik intrakomunitas dengan negara.

Pengelola Bank Sampah *Gardu Action* awalnya berusaha mengajukan proposal permintaan bantuan transportasi untuk armada

³⁴ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), 3-26.

pengangkutan sampah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Akan tetapi, pemerintah daerah menolak memberikan bantuan dengan alasan harus memasuki tahun anggaran baru untuk memberi bantuan. Pengelola Bank Sampah *Gardu Action*, kemudian berusaha meminjam gerobak angkut ke pemerintah Kota Yogyakarta, namun ditolak karena berbeda wilayah pengelolaan. Usaha Bank Sampah *Gardu Action* untuk mengagregasikan kepentingannya melalui sistem politik formal ini adalah upaya komunitas yang telah berdaya untuk ikut berkontestasi dalam pentas demokrasi substantif dengan aktor negara. Usaha Bank Sampah ini memperlihatkan bagaimana sistem politik formal ternyata masih lebih *superior* dibandingkan dengan sistem politik intrakomunitas.

Bank Sampah *Gardu Action* terus mencoba mengagregasikan kepentingannya melalui sistem politik formal, sampai akhirnya direspon oleh aktor negara melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul. BLH Kabupaten Bantul berupaya memberikan bantuan gerobak angkut dan penyediaan fasilitas kepada Bank Sampah *Gardu Action*, bukan dengan tanpa kepentingan. BLH Kabupaten Bantul berkepentingan untuk mengikuti lomba bank sampah tingkat provinsi, sehingga ingin menjadikan Bank Sampah *Gardu Action* sebagai produk yang ingin diperlombakan. BLH Kabupaten Bantul akhirnya memberikan bantuan peminjaman gerobak angkut dan uang sebesar Rp500.000,00 untuk membangun ruang administrasi kepada Bank Sampah *Gardu Action*. Dalam hal ini terlihat bagaimana aktor negara berusaha berkontestasi dengan komunitas.

Terjadi proses tukar menukar kepentingan antarpihak aktor negara yang direpresentasikan dengan BLH dengan komunitas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun melalui sistem politik formal agregasi kepentingan dari komunitas tidak dapat dilakukan. Namun, apabila terdapat kepentingan bersama antara negara dan komunitas, maka akan terjadi proses tawar-menawar dalam rangka penyelesaian

masalah bersama. Akan tetapi, dalam proses interaksi ini ternyata secara tidak langsung komunitas tetap terkesan termarginalkan. Dalam usaha pembangunan ruang administrasi ternyata dana tidak mencukupi, sehingga terpaksa hanya memakai sisa bangunan dan ruang sempit yang tersisa untuk pembangunan kantor.

Kesimpulan

Peningkatan laju pariwisata dan banyaknya pendatang telah merubah karakteristik sistem politik intrakomunitas Mancingan XI. Peningkatan laju pariwisata dan jumlah pendatang telah menyebabkan munculnya problem lingkungan baru berupa penumpukan timbunan sampah di TPS yang berlokasi di RT 02, Dusun Mancingan XI. Klimaks dari masalah sampah yang muncul adalah hampir meningkatnya ketegangan sosial. Sistem politik intrakomunitas mencoba merespon terhadap *input* yang muncul tersebut.

Sistem politik intrakomunitas berusaha menata dan mengembalikan sinergi pengelolaan lingkungan khususnya di RT 02, Dusun Mancingan XI. Sistem politik intrakomunitas akhirnya memberikan jawaban berupa Bank Sampah sebagai jawaban. Hadirnya Bank Sampah yang disebut *Gardu Action* mencerminkan *output* dan *outcome* yang muncul dari sistem politik intrakomunitas yang mendorong perubahan yang lebih baik.

Hadirnya Bank Sampah *Gardu Action* telah menjadi elemen penting baru dari sistem politik intrakomunitas Mancingan XI. Bank Sampah *Gardu Action* telah membawa peranan baru dalam membawa kehidupan komunitas menuju arah yang lebih baik. Bank Sampah *Gardu Action* telah melaksanakan fungsi baru yang semakin melengkapi kinerja sistem politik intrakomunitas, fungsi yang dimaksud adalah manajemen konflik, pemberdayaan dan demokratisasi.

Bank Sampah *Gardu Action* telah mampu meredam masalah sampah dan konflik sosial yang hampir saja muncul di dalam komunitas. Bank Sampah *Gardu Action* telah memberi

sumber penghidupan tambahan bagi komunitas dengan menjadi tempat wisata alternatif dan mengolah sampah menjadi barang ekonomis. Bank Sampah *Gardu Action* telah menjadi wahana demokratisasi di tingkat lokal dibuktikan dengan arus sukarelawan yang kuat, mekanisme konsensus lewat *rembug*, dan adanya relasi yang kuat antara komunitas dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Easton, David. *Approaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company, 1992.
- Mas'ood, Mohtar., dan Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sitepu, Antonius. *Sistem Politik Indonesia*. Medan: Fisip Press, 2004.
- Suwondo, Kutut. *Civil Society di Aras Lokal Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa*. Salatiga: Pustaka Percik, 2005.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2007.
- Artikel dalam Jurnal, Majalah dan Surat Kabar**
- Arianto, Kurniawan., dan Eliza Nur Fitriana, "Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 17, No 2 (November 2013): 37-49.
- Budilestari, Ninik., Malikusworo Hutomo., dan Roby Ardiwidjaja." Permasalahan Lingkungan Di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2014): 91-107.
- Hasan, Mahfud., Prehatin Trirahayu Ningrum., Khoiron. "Perilaku Wisatawan Terhadap Penanganan Sampah dan Total Coliform Pada Air Danau Ranu Kumbolo TNBTS Kabupaten Lumajang," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2015): 1-10.
- Kristiniati, Rahayu., dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 2 (September 2014): 206-220.
- Nawawi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis," *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 5, Nomor 2 (Agustus 2013): 103-110.
- Prasyanti, Shinta. "Difusi Inovasi dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Acta Diurna*, Vol 9, No.1 (2013): 58-67.
- Sudaryono. "Pilar-Pilar Tata Ruang Lokal :Studi Kasus Parangtritis," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 18 No 2 (Agustus 2007): 33-73.
- Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1 (Juni 2011): 15-27.
- Widyastuti, A. Reni. "Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan," *Jurnal Ekosains*, Vol. II No. 3, (Oktober 2010): 69-82.

Website

- "Apa Itu *Gardu Action*?". SMP N 2 Bambang Lipuro, 17 Januari 2017, diakses pada 15 April 2017, <http://smpn2bambanglipuro.sch.id/2017/01/17/apa-Gardu-action/>.
- Bayuaji, Tri Mujoko. "Vika Wahyu Aji, Penggagas Bank Sampah di Pinggiran Parangtritis." *Jawa Pos*, 6 Agustus 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://www.jawapos.com/read/2016/08/04/43011/vika-wahyu-aji-penggagas-bank-sampah-di-pinggiran-parangtritis>.
- Iryanti, Meisa." *Gardu Action* Wahana Edukasi Sampah yang Unik." *Tribun News*, 13 Januari 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/01/13/Gardu-action-wahana-edukasi-sampah-yang-unik>.
- Ladiatno, Samsara." Berawal dari Keprihatinan Banyaknya Sampah Tercipta Ide Bank Sampah." *Inovasi Administrasi Negara*, 1 September 2016, diakses pada 15 April 2017, <http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=post/read&id=857>.
- "Mahasiswa dan Dosen UAD Peduli Sampah." *Universitas Ahmad Dahlan*, 22 Agustus 2015, diakses pada 15 April 2017, <http://uad.ac.id/id/berita/mahasiswa-dan-dosen-uad-peduli-sampah>.
- Norras, Dian." *Gardu Action* Asyiknya Selfie dan Pasang Aksi Memanfaatkan Barang Tak Terpakai." *YogYes*, 1 September 2016, diakses pada 15 April 2017, <https://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-object/other/Gardu-action/>.
- Nurdiyansyah, Hendra." *Gardu Action*, Mengurai Sampah Menjadi Wisata Edukasi." *Maioloo*, 3 Mei 2016, diakses pada 15 April 2017, <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/yogyakarta-jogja/Gardu-action/>.
- Purbathin Hadi, Agus." Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan," diunduh pada 27 April 2017, <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>
- Puspitosari, Hesty., Khalikussabir., dan Luthfi J. Kurniawan. *Filosofi Pelayanan Publik Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2011.
- Yogya, Koran." Bank Sampah *Gardu Action* 'Garbage Care And Education.'" *Koran Yogya*, 8 November 2015, diakses pada 15 April 2017, <https://koranyogya.com/bank-sampah-Gardu-action-garbage-care-and-education/>.